

## Poros Maritim dan Politik Luar Negeri Jokowi

Ali Maksum<sup>1</sup>

### Abstract

*This article discusses the President Joko Widodo's poros maritim dunia or global maritime axis and the Indonesian foreign policy. This policy optimistically to strengthen Indonesia's maritime capability and also to reviving the country as maritime super power as in the early history. Once Joko Widodo seizes the mandate after his dramatic victory in the last presidential election 2014, political polarization becomes a serious challenge to his administration. Yet, at the same time he obtained a huge international attention. Thus, this article attempt to understand Joko Widodo's maritime policy from foreign policy perspective. Basically, foreign policy is determined by two factors namely international and domestic. To be more systematic, this article divided into five sections i.e.; introduction, maritime axis and Jokowi's foreign policy, maritime axis and domestic politics, maritime axis and neighboring countries, and conclusion.*

**Keywords:** *maritime axis, foreign policy, international factors, domestic factors*

---

<sup>1</sup> CenPRIS USM. Untuk tujuan akademik penulis dapat dihubungi di email : amaksum@gmail.com

Ali Maksum | Poros Maritim dan politik Luar Negeri Jokowi  
*Nenek moyangku seorang pelaut  
Gemar mengarung luas samudra  
Menerjang ombak tiada takut  
Menempuh badai sudah biasa*

*Angin bertiup layar terkembang  
Ombak berdebur di tepi pantai  
Pemuda b'rani bangkit sekarang  
Ke laut kita beramai-ramai*

*(Lirik Lagu Nenek Moyangku Seorang  
Pelaut- Ibu Sud)*

## **Pendahuluan**

Ide poros maritim dunia atau “*global maritime axis*” adalah gagasan besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah dikampanyekan sejak kampanye Pilihan Presiden (Pilpres) 2014. Gagasan ini muncul di tengah berbagai permasalahan bangsa seperti korupsi, kebocoran anggaran, ketidakadilan dan sebagainya. Ide poros maritim menjadi harapan besar bangsa Indonesia agar kembali ke jati diri sebagai bangsa pelaut. Gagasan maritim yang sudah dimulai diimplementasikan sudah tentu akan berdampak kepada kebijakan luar negeri Indonesia. Namun poros maritim juga menimbulkan tantangan sekaligus peluang yang apabila dapat diselesaikan bisa menjadi *driving force* agar negara semakin

maju. Tidak dipungkiri, reaksi juga datang baik dari dalam maupun luar negeri yang jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi batu sandungan ide poros maritim.

## **Poros Maritim dan Kebijakan Luar Negeri Jokowi**

Poros maritim merupakan gagasan besar Presiden Jokowi yang ingin mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa pelaut. Namun Presiden Jokowi menggaris bawahi bahwa yang dimaksud bangsa pelaut dengan ide besar poros maritim bukanlah sekedar menjadi “*jongos-jongos* di kapal. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, armada militer, yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”<sup>2</sup> Namun inti dari pesan Jokowi sebenarnya terletak pada peningkatan infrastruktur maritim yang

<sup>2</sup> *Badan Informasi Geospasial*, “Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri,” dalam <http://www.bakosurtanal.go.id/beritasurta/show/mewujudkanindonesiasebagaiporosmaritimduniayangmajudanmandiri> (diakses 29 Januari 2015).

selama ini terbengkalai. Akibatnya berbeda di mana negara hanya mengalami Indonesia kehilangan banyak peluang yang kerugian sekitar Rp. 65 triliun per tahun. seharusnya bisa menjadi sumber Oleh karena itu, bisa dibayangkan ratusan pendapatan negara. Lebih jauh lagi, ide triliun rupiah devisa negara lenyap setiap poros maritim tidak lain adalah untuk tahun. Indonesia yang terletak di antara meningkatkan konektivitas antar pulau- dua benua Australia dan Asia sangat pulau yang sangat lemah akibat buruknya strategis bagi jalur perdagangan sarana dan prasarana. Ini merupakan internasional. Dalam hal ini Indonesia agenda pokok poros maritim yang yang menurut Konvensi Hukum Laut berambisi menghubungkan ribuan Internasional (UNCLOS) 1982, memiliki kilometer garis pantai terutama dengan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia menambah fasilitas pelabuhan.<sup>3</sup> (ALKI) di mana merupakan jalur

Munculnya poros maritim tidak pelayaran dan penerbangan internasional lain dilatarbelakangi oleh berbagai belum sepenuhnya bisa dimaksimalkan. permasalahan di bidang kelautan. Diperkirakan jika dioptimalkan ketiga Misalnya menurut Data Badan Pemeriksa ALKI tersebut maka Indonesia berpotensi Keuangan (2013) memperkirakan potensi memperoleh keuntungan sebesar 1.500 pendapatan sektor perikanan laut jika USD atau 45% dari total nilai perdagangan tanpa *illegal fishing* bisa mencapai Rp. 365 dunia.<sup>4</sup> Walaupun tampak menjanjikan, triliun per tahun. Namun disebabkan namun tidak sedikit yang mengkritik dan *illegal fishing*, negara mengalami kerugian pesimis dengan kalkulasi di atas dengan sangat besar. Kementerian Kelautan dan berbagai alasan logis tentunya. Perikanan (2011), mempunyai temuan

<sup>3</sup> Vibhanshu Shekhar and Joseph Chinyong Liow, "Indonesia as a Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies, and Obstacles Ahead," (Washington, D.C: The Brookings Institution, November 2014).

<sup>4</sup> Badan Informasi Geospasial, "Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri."

Sebelum membahas lebih lanjut tentang gagasan poros maritime dan kebijakan luar negeri, perlu dijelaskan tentang tren kebijakan luar negeri Indonesia dalam beberapa dekade. Kebijakan luar negeri Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fondasi awal yang digagas oleh Mohammad Hatta dengan konsep “bebas-aktif.” Landasan politik luar negeri bebas-aktif pada dasarnya lebih dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Mohammad Hatta yang tidak mau Indonesia terseret dalam kontestasi Perang Dingin yang baru berkecamuk pada tahun 1947.<sup>5</sup> Apalagi, banyak kelompok “kiri” di tengah berkobarnya revolusi fisik dan anti-penjajahan, condong memihak blok komunis. Hal ini diperkuat dengan pecahnya peristiwa berdarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun, Jawa Timur atau “*Madiun Affairs*. ”<sup>6</sup> Kebijakan luar negeri

bebas-aktif, terlihat semakin menjauh dan semakin ke “kiri.” Kebijakan Sukarno di bawah Demokrasi Terpimpin yang sering membela kelompok komunis semakin menguatkan pendapat ini. Kebijakan Konfrontasi dengan Malaysia dan perebutan Irian Barat secara militer menunjukkan agresifitas kebijakan luar negeri Sukarno yang didukung penuh blok Komunis terutama Uni Soviet dan PKI di dalam negeri.<sup>7</sup> Sebaliknya, pada era Suharto kebijakan luar negerinya berubah total bahkan semakin ke “kanan.” Ide-ide dan gagasan beroreintasi pembangunan merupakan jargon utama Suharto ketika baru memimpin Indonesia. Dampaknya, kebijakan luar negerinya tidak lain adalah mengundang sebanyak mungkin investasi asing ke dalam negeri dengan mengorbankan aspek-aspek pemerataan sosial-politik di daerah.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Leo Suryadinata, *Indonesia's Foreign Policy under Suharto: Aspiring to International Leadership* (Singapore: Times Academic Press, 1997).

<sup>6</sup> Rizal Sukma, *Islam and Foreign Policy in Indonesia: Internal Weakness and the Dilemma of*

*Dual Identity*, The Asia Foundation Working Paper, no. 11, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999).

<sup>7</sup> Sheldon W. Simon, “Indonesia's Foreign Policy by Michael Leifer Review,” *Pacific Affairs*, Vol. 57, No. 1 (Spring, 1984): 171-172.

<sup>8</sup> Simon, 172.

Sementara BJ Habibie yang memerintah di era transisi tidak dapat berbuat banyak dan lebih fokus dengan permasalahan dalam negeri. Pada era Gus Dur kebijakan luar negeri Indonesia lebih moderat dan lebih fokus untuk meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dan stabilitas kawasan menjadi tema utama kebijakan luar negeri Indonesia era Megawati. Dampaknya ASEAN kembali menjadi bagian penting dalam kerangka kebijakan luar negeri Indonesia yang kurang mendapat perhatian pada era Gus Dur.<sup>9</sup> Adapun di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebijakan luar negeri Indonesia di atas jalur yang semakin stabil. Konsep “*many friends-zero enemy*” menjadi jargon utama. Di era SBY postur politik internasional Indonesia semakin meningkat seiring dengan beberapa keberhasilan misalnya menjadi anggota G-

20, “*the third largest democracy*,” dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Selain itu, dua kemitraan strategis berhasil ditandatangani yaitu dengan Amerika Serikat dan China.<sup>10</sup>

Melihat tren di atas tentunya, bisa dilihat bentuk dan arah kebijakan luar negeri Presiden Jokowi. Pembentukan poros maritim tampaknya ingin menegaskan kebijakan luar negerinya yang beroreintasi pembangunan kelautan di mana sebelumnya kurang menjadi perhatian. Namun secara jelas dinyatakan oleh Presiden Jokowi sendiri bahwa bebas-aktif masih menjadi basis kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Selengkapnya berikut kutipan pernyataan Presiden Jokowi dalam pidato perdana pasca pelantikan presiden 20 Oktober 2014.

"Saya ingin menegaskan bahwa (dalam) pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara terbesar

<sup>9</sup> Dewi Fortuna Anwar and Harold Crouch, *Indonesia: Foreign Policy and Domestic Politics*, Trends in Southeast Asia Series, no. 9 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).

<sup>10</sup> Ratna Shofi Inayati, “Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia,” *Jurnal Penelitian Politik* 2, no.1 (2005): 35-49.

ketiga, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diartikan untuk kepentingan nasional dan untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."<sup>11</sup>

Pernyataan Presiden Jokowi jelas menunjukkan bahwa asas bebas-aktif masih menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia, meskipun diyakini akan disesuaikan dengan situasi kontemporer. Terkait dengan ini, Jennifer Sterling-Folker mengatakan bahwa "sejak berakhirnya Perang Dingin kajian internasional menunjukkan munculnya bidang-bidang baru seperti norma, ide-ide,

pendidikan dan identitas."<sup>12</sup> Hal ini tidak berarti tema-tema tentang *hard power* tidak relevan dan lebih mengarah ke kajian *ideational*. Kajian kebijakan luar negeri, urgensi peran negara dan studi kemiliteran masih sangat relevan namun dengan sedikit modifikasi. Menurut Kenneth Waltz "demokrasi semakin menjadi tekanan, rasa saling tergantung semakin kuat dan peran institusi sebagai pelopor perdamaian dunia semakin penting."<sup>13</sup>

Waltz percaya bahwa "perubahan struktur politik internasional akan berdampak terhadap sikap dan interaksi sebuah negara. Namun tidak akan berubah kepentingan politik internasionalnya."<sup>14</sup> Artinya yang terjadi sebenarnya adalah *perubahan* dan bukan *transformasi* karena keadaan tersebut tidak merubah sikap ogois (*self-help*) sebuah negara, kecuali

<sup>11</sup> "Politik Luar Negeri Bebas Aktif Masih Jadi Pijakan Pemerintahan Presiden Jokowi," *VOA Indonesia*, 21 Oktober 2014, dalam <http://www.voaindonesia.com/content/politik-luar-negeri-bebas-aktif-masih-jadi-pijakan-pemerintahan-presiden-jokowi/2490867.html> (diakses 30 Januari 2015).

<sup>12</sup> Jennifer Sterling-Folker, "Competing Paradigms or Birds of a Feather? Constructivism and Neoliberal Institutionalism Compared," *International Studies Quarterly* 44, no.1 (March 2000): 97-119, 97.

<sup>13</sup> Kenneth N. Waltz, "Structural Realism after the Cold War," *International Security* 25, no. 1 (Summer 2000): 5-41, 6.

<sup>14</sup> Waltz, 39. Penjelasan lain lihat Charles L. Glaser, "Structural Realism in a more complex world," *Review of International Studies*, 29 (2003): 403-414.

jika sistem internasional tidak dihuni oleh negara sama sekali.<sup>15</sup>

Secara umum, analisis kebijakan luar negeri mempunyai empat dasar yang menjadi ciri khas. Pertama, merupakan teori yang *multifactorial* atau bisa menerima banyak faktor. Kedua, bisa menerima dan menggunakan lebih dari satu variabel atau *multilevel analysis*. Ketiga, analisisnya dipandang lebih fleksibel. Hal ini karena dalam menjelaskan atau menganalisis sebuah kebijakan luar negeri bisa dilihat dari berbagai sudut pandang seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi dan lain sebagainya. Keempat, analisis kebijakan luar negeri harus integratif merangkumi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan masuknya berbagai unsur tersebut maka analisis yang dihasilkan akan semakin komprehensif.<sup>16</sup> Dalam konteks ini jelas kebijakan luar negeri Indonesia

harus mempertimbangkan banyak faktor terutama faktor internasional dan kondisi politik dalam negeri. Khusus di level Asia Tenggara, posisi ASEAN harus dipertimbangkan di mana selain Indonesia sebagai salah satu negara pendiri dan terpenting dalam organisasi ini. Dewi Fortuna Anwar juga berpandangan, meskipun terjadi perubahan politik domestik, ASEAN tetap menjadi salah satu fokus Indonesia yang menganut prinsip bebas dan aktif.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN memiliki posisi strategis bagi Indonesia dan ditopang oleh dukungan penuh negara-negara anggota akan peran sentral Indonesia dalam organisasi.<sup>18</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ganesan dan Ramses Amer bahwa

<sup>15</sup> Kata yang tercetak miring menunjukkan penekanan penulis. Lihat Waltz, "Structural Realism after the Cold War."

<sup>16</sup> Pembahasan lanjut lihat Valerie M. Hudson, "Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations," *Foreign Policy Analysis*, 1(2005): 1–30.

<sup>17</sup> Dewi Fortuna Anwar, "Key Aspects of Indonesia's Foreign Policy," dalam *Indonesia: Foreign Policy and Domestic Politics*, eds. Dewi Fortuna Anwar and Harold Crouch (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).

<sup>18</sup> Rizal Sukma, "The Future of ASEAN: Towards A Security Community," paper presented at A Seminar on "ASEAN Cooperation: Challenges and Prospects in the Current International Situation," New York, 3 June 2003.

“ASEAN memainkan peran krusial dalam politik luar negeri Indonesia.”<sup>19</sup>

Pada dasarnya perumusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh keadaan internasional dan politik dalam negeri. Lili Yulyadi Arnakim misalnya mengatakan bahwa dinamika politik internasional sering memaksa sebuah negara merubah norma dan corak politik tertentu dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kedahulatan negara dalam sistem internasional.<sup>20</sup> Perumusan kebijakan luar negeri sendiri pada dasarnya menurut Mohd Noor Yazid juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan di tingkat domestik dan internasional.<sup>21</sup> Perubahan-perubahan tersebut secara tidak langsung juga akan mempengaruhi

skenario politik dalam negeri terutamanya persepsi pemimpin (presiden/pemimpin negara) sebagai elemen penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Namun, persepsi seorang pemimpin juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh struktur politik internasional.<sup>22</sup> Sementara, Rizal Sukma lebih sepakat dengan Yazid yang menyatakan bahwa agenda politik global sering menekan/memaksa banyak negara untuk merubah kebijakan luar negeri dan postur pertahanannya.<sup>23</sup> Terkait dengan adanya tekanan internasional, Dewi Fortuna Anwar mencontohkan apa yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Menurut Dewi Fortuna keberhasilan proses demokrasi di Indonesia bukanlah disebabkan oleh kemelut politik domestik semata-mata, namun lebih disebabkan oleh desakan negara-negara Barat.<sup>24</sup> Oleh karena itu, Ratna Shofia Inayati

<sup>19</sup> N. Ganesan and Ramses Amer, eds., *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 323.

<sup>20</sup> Lili Yulyadi Arnakim, “Hubungan Dinamik Antara Indonesia dan Malaysia Pasca Merdeka: Peranan Faktor “Co-Religio” Dalam Hubungan Dua Hala, dalam *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia*, eds. Mohamad Redzuan Othman, Md Sidin Ahmad Ishak, Jas Laile S. Jaafar, Adrianus Meliala and Sri Murni (Shah Alam: Arah Publications, 2009), 359-371.

<sup>21</sup> Mohd Noor Yazid, “Indonesia-Malaysia Political Relations: the Idiosyncratic Factor in Foreign Policy Decision Making,” *Asian Profile* 34, no.5 (October 2006): 455-476.

<sup>22</sup> Ibid., 457.

<sup>23</sup> Rizal Sukma, “War on terror: Islam and the imperative of democracy,” *Asia Europe Journal*, 2 (2004): 85-93, 87.

<sup>24</sup> Dewi Fortuna Anwar, “Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia,” *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 3 (2010): 37-54, 44.

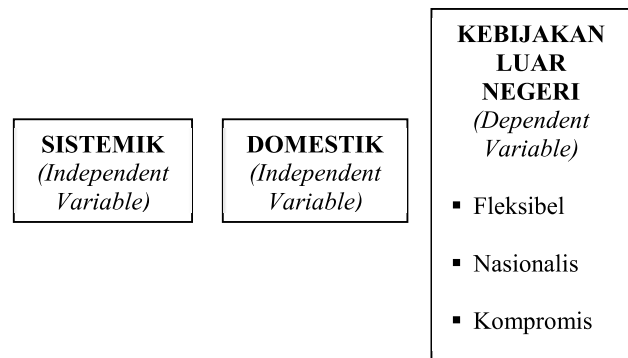


menyatakan bahwa sebuah negara harus selalu mengamati skenario/trend politik internasional yang sedang berkembang. Karena, kemungkinan besar bisa memaksa sebuah negara melakukan sebuah tindakan mengikuti kehendak internasional sebagai akibat era globalisasi.<sup>25</sup> Selain itu, dalam merumuskan kebijakan luar negeri pemerintah harus mewaspadai adanya campur tangan asing dengan berbagai kepentingannya.<sup>26</sup> Hal ini jelas menunjukkan bahwa faktor internasional/sistemik sangat menentukan sikap dan kebijakan luar negeri sebuah negara selain dipengaruhi konstelasi politik dalam negeri.

Agar lebih sistematis, perlu sebuah kerangka analisa (*frameworks design*) dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan perbincangan di atas sebuah kebijakan luar negeri yang merupakan variabel

tergantung/*dependent* ditentukan oleh variabel internasional (sebagai; faktor bebas/*independent*) dan variabel dalam negeri (sebagai; faktor bebas/*independent*). Secara umumnya, bentuk sikap/kebijakan luar negeri sebuah negara ada empat yaitu fleksibel, nasionalis, kompromi dan tidak melakukan tindakan/retorika saja. Di bawah ini adalah kerangka analisis perumusan kebijakan luar negeri Indonesia.

### Kerangka Analisis Perumusan Kebijakan Luar Negeri<sup>27</sup>



### Poros Maritim dan Politik Dalam Negeri

Secara spesifik, elemen-elemen domestik yang kemungkinan besar akan

<sup>25</sup> Ratna Shofi Inayati, "Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 2, no.1 (2005): 35-49.

<sup>26</sup> Ratna Shofi Inayati, 47.

<sup>27</sup> Diadopsi dan diubah dari Jeffrey W. Taliaferro, "State Building for Future Wars: Neoclassical Realism and the Resource-Extractive State," *Security Studies* 15, no. 3 (July–September 2006): 464–495, 477.

mempengaruhi proses perumusan gagasan tersebut. KIH terdiri dari Partai kebijakan luar negeri menurut Sterling-Folker yaitu partai politik, opini publik, media, elit politik, lembaga legislatif, budaya politik, kelompok kepentingan, bentuk pemerintahan dan status negara.<sup>28</sup> Dalam konteks isu kebijakan luar negeri Presiden Jokowi, elemen yang kelihatan mempengaruhi adalah partai politik, lembaga legislatif dan kelompok kepentingan. Dalam hal ini, perlu penjabaran lebih lanjut tentang ketiga komponen tersebut yang tampaknya memainkan peran berbeda dalam mempengaruhi serta mengkritisi kebijakan Jokowi.

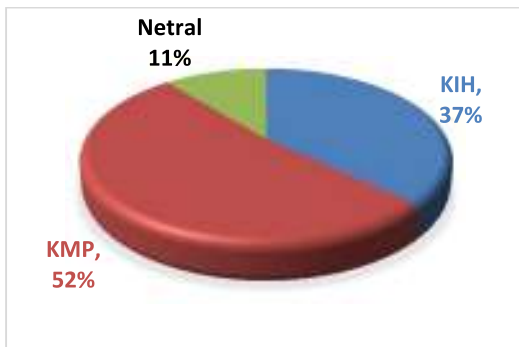
Unsur partai politik sudah pasti tidak bisa dilepaskan dalam kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi termasuk kebijakan luar negeri. Dalam konteks ide poros maritim sudah terlihat jelas bahwa partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KHI) dibelakang

Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kekuatan politik KIH berhadapan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan gabungan partai pengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Untuk mengetahui konfigurasi politik di parlemen berikut tabel lengkap komposisi DPR berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2014.

<sup>28</sup> Jennifer Sterling-Folker, "Realist Environment, Liberal Process, and Domestic Politics," *International Studies Quarterly* 14, no.1 (March 1997): 1-25, khususnya halaman 2, 18-20.

## Peta Kekuatan KIH dan KMP di DPR<sup>29</sup>



Dengan demikian, terlihat jelas peta politik partai-partai politik di DPR. Partai-partai tersebut alur politiknya semakin jelas sejak polarisasi KIH dan KMP pada Pilpres 2014. Sedangkan elemen kelompok kepentingan tampaknya lebih didominasi oleh orang-orang di sekitar Jokowi yang tidak lain adalah tim-sukses dan relawan. Melihat tabel di atas, PKPI dan PBB tidak masuk dalam rekapitulasi perolehan kursi di DPR karena suara yang diperoleh di bawah ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Namun kedua partai politik sudah

menyatakan komitmennya di kedua koalisi masing-masing.

Untuk mengimplementasikan kebijakan poros maritim dunia, Jokowi mengenalkan lima pilar utama; (1) budaya maritim, (2) menjaga dan mengelola sumber daya laut, (3) pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, (4) diplomasi maritim, (5) membangun kekuatan pertahanan maritim.<sup>30</sup> Tujuan kelima pilar tersebut tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun di tahapan awal beberapa kebijakan yang diluncurkan untuk mengimplementasikan pilar-pilar ini justru dikritik.

Terkait dengan kebijakan kementerian kelautan dan perikanan yang terfokus kepada penangkapan dan pembakaran kapal-kapal pencuri ikan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) misalnya menyatakan bahwa

<sup>29</sup> Data diolah dari *Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014).

<sup>30</sup> "Pidato Jokowi: Indonesia poros maritim dunia," dalam <http://www.rappler.com/world/regions/asiapacific/indonesia/74928-pidato-jokowi-indonesia-poros-maritim-dunia> (diakses 29 Januari 2015).

“kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang otoriter dan tanpa sosialisasi untuk dihentikan, karena tidak memberikan peningkatan kesejahteraan kepada pelaku usaha perikanan.”<sup>31</sup>

Sementara Ketua Komisi I DPR-RI, Mahfuz Siddiq mengkritik tentang kebijakan pemerintah dalam isu penenggelaman kapal-kapal asing. Mahfuz menyarankan untuk memperkuat aspek pertahanan dahulu dan pengawasan di kawasan laut. Apa yang dikhawatirkan misalnya jika kapal Tiongkok yang ditenggelamkan, maka bisa memancing kemarahan negara terkait. Menurut Mahfuz, justeru kebijakan poros maritim Jokowi banyak memundurkan pelaku ekonomi maritim sendiri. Misalnya terkait kebijakan menaikkan harga solar sebesar Rp 2000 membuat para nelayan menjerit. Tetapi malah mereka ditargetkan

peningkatan hasil tangkapan ikan.<sup>32</sup> Lebih lanjut, Mahfuz juga mengkritisi Jokowi yang seolah-olah seperti *marketing officer* dalam Forum CEO-APEC 2014 di Beijing, China. Menurut anggota Fraksi PKS ini “gagasan poros maritim bermakna membuka wilayah perairan Indonesia kepada pemain-pemain besar dunia dan apabila kondisi itu terjadi, bisa berbahaya.”<sup>33</sup>

Menurut pakar kelautan Y. Paonganan, kebijakan poros maritim Jokowi harus dikaitkan dengan isu sengketa Laut Cina Selatan. Karena Laut Cina Selatan adalah jalur utama perdagangan dunia dari dan menuju Asia-Pasifik yang merupakan lanjutan dari ALKI I melewati Selat Malaka. Secara langsung adalah bagian dari poros maritim dunia. Belum lagi isu Laut Cina Selatan

<sup>31</sup> “Asosiasi perikanan kritik kebijakan Menteri Susi,” *Antara*, 21 Januari 2015, dalam <http://www.antaraneews.com/berita/475351/asosiasi-perikanan-kritik-kebijakan-menteri-susi> (diakses 23 Februari 2015).

<sup>32</sup> “DPR Kritik Perintah Jokowi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal,” *Republika*, 25 November 2014, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/25/nfl5wm-dpr-kritik-perintah-jokowi-tenggelamkan-kapal-asing-ilegal> (diakses 24 Februari 2015).

<sup>33</sup> “Ketua Komisi I DPR Kritik Jokowi di APEC,” dalam <http://m.inilah.com/news/detail/2153484/ketua-komisi-i-dpr-kritik-jokowi-di-apec> (diakses 24 Februari 2015).

juga erat kaitannya dengan posisi Natuna dan Kepulauan Spartly yang banyak mengandung migas dan mineral. “Jadi terkait konflik Laut Cina Selatan, Indonesia tidak bisa diam begitu saja, tetapi harus mengantisipasi kelakuan Tiongkok yang merasa paling hebat di Asia.” Sehingga, “jika Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, ya harus paham masalah Laut Cina Selatan, jika tidak ya omong kosong namanya.”<sup>34</sup>

Kritik pedas juga datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menilai kebijakan poros maritim tidak serius seperti yang diharapkan. Salah satu anggota DPD menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya untuk menarik simpati saja pada waktu kampanye dan di awal pemerintahannya. Misalnya berpendapat bahwa “Jokowi dalam debatnya menyatakan sudah terlalu lama bangsa dan negara ini memungungi laut.

Kalau dia dipercaya rakyat jadi presiden, maka dia akan membangun poros maritim. Tetapi setelah memasuki bulan keempat jadi presiden, Jokowi terkesan lupa akan janji-janjinya.” Salah satu indikasinya adalah pemerintah justru dalam proses pembahasan revisi APBN-Perubahan 2015 tidak memperkuat anggaran sektor maritim. Karena faktanya dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK) dari pusat untuk daerah kepulauan tidak berubah signifikan. “Sama sekali tidak terlihat komitmen pemerintah terhadap pembangunan negara maritim. Sejumlah daerah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau, Maluku dan Maluku Utara serta Bangka Belitung tidak berubah alokasi DAU dan DAK-nya sebagai provinsi kepulauan.”<sup>35</sup>

Menghadapi berbagai kritik tersebut, berbagai pihak menanggapi beragam. Dalam salah satu wawancara pakar manajemen Prof. Renald Kasali

<sup>34</sup> “Pakar Maritim Anggap Jokowi 'Bulshit', Tak Paham Sok Bicara Poros Maritim,” *SuaraNews*, dalam <http://www.suaranews.com/2014/06/pakar-maritim-anggap-jokowi-tak-paham.html> (diakses 24/2/2015).

<sup>35</sup> “Mulai Curiga Jokowi Hanya Membual soal Poros Maritim,” *JPPN*, 5 Februari 2015, dalam <http://m.jpnn.com/news.php?id=285741> (diakses 24 Februari 2015).

misalnya menangkis kritik pedas anggota

Kubu Jokowi sendiri dalam 100

DPR atas pidato Jokowi dalam forum CEO-APEC dengan mengatakan bahwa “Kalau membuat pernyataan itu hendaklah cerdas!.” Karena Renald berpandangan bahwa apa yang dilakukan Jokowi sangat tepat sebagaimana Presiden Bill Clinton di masa-masa awal memegang kekuasaan yang melihat kondisi kurang baik perekonomian negaranya. Hal ini menunjukkan kesadaran tinggi Jokowi sebagai mana Bill Clinton atas keterpurukan ekonomi negaranya dengan “ikut turun tangan langsung” untuk memasarkan pesawat Boeing yang sedang mengalami kesulitan akibat kalah bersaing dengan Air Bus. Langkah yang sama juga dilakukan penerus Clinton, Barrack Obama yang juga memposisikan dirinya layaknya pegawai pemasaran. Hasilnya, pada KTT APEC, 18 November 2011, di Bali, Lion Air membeli 230 pesawat Boeing 737 dengan nilai 21,7 miliar Dollar AS.<sup>36</sup>

hari kepemimpinannya menyatakan dukungannya terhadap gagasan poros maritim dunia. Salah satu pimpinan PDI-P Arif Budiman Menurut Arif, mengatakan “salah satunya diturunkan ke dalam konsep Restorasi Maritim Indonesia; mengatasi pasar gelap tuna dan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); memberantas *illegal fishing*, ekspansi budidaya laut; dan mengembangkan padat karya di sektor maritim.” Pendapat Arif Budiman muncul di tengah realitas bahwa tahun 2011 saja potensi pendapatan sektor perikanan laut adalah Rp 65 triliun dan terjadi *illegal fishing*. Sedangkan audit BPK 2012 menemukan bahwa devisa negara bisa mencapai Rp 365 triliun namun hilang karena terjadinya *illegal fishing*. Dengan kata lain negara kehilangan potensi devisa sebesar Rp 300 triliun.<sup>37</sup>

KTT APEC,” *kompasiana.com*, dalam <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/11/13/jokowi-memang-harus-jadi-pedagang-di-ktt-apec-686396.html> (diakses 24 Februari 2015).

<sup>37</sup> “PDIP: Doktrin Maritim Jokowi Bikin Indonesia Disegani Dunia,” *Rakyat Merdeka*, 3 Juli 2014,

<sup>36</sup> “Jokowi Memang Harus Jadi “Pedagang” di

Namun seiring dengan kemelut internal PDI-P dan KIH pasca kompromi politik yang tidak memuaskan pasca Pilpres 2014, beberapa pihak di PDI-P justru melontarkan kritik. Politikus PDI Perjuangan Adang Rukhiatna misalnya menyatakan bahwa wacana poros maritim Presiden Joko Widodo bertolak belakang dengan latar belakangnya yang lahir dan besar di Solo, Jawa Tengah dan bisa dikategorikan sebagai orang Solo (orang daratan). Bahkan bisa dinilai Jokowi tidak paham dengan masalah kemaritiman, kelautan dan tol laut secara mendalam yang selama ini dikampanyekan. Adang bahkan menduga “wacana kemaritiman, kelautan dan tol laut saat ini ditunggangi oleh banyak pihak. Kewajiban kita semua untuk mengawal dan meluruskan obsesi Jokowi mengenai kemaritiman, kelautan dan tol laut itu.”<sup>38</sup> Pendapat yang sama

juga dinyatakan oleh kader PDI-P lain bahwa wacana pembentukan poros maritim, dan kelautan yang digelontorkan oleh Presiden Joko Widodo diduga telah ditunggangi oleh banyak pihak dan karenanya harus dikawal dan diluruskan.<sup>39</sup>

Kekhawatiran berbagai pihak bahkan dari orang-orang di sekitar Jokowi bukannya tanpa alasan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa modal dan investasi asing telah menggurita di Indonesia. Walaupun dari aspek kemanfaatan ekonomi, fenomena ini bermanfaat. Namun pada tingkat tertentu, keadaan ini harus diperhatikan dan kalau perlu diwaspadai. Menurut pengamat energi dari *Indonesia Resources Studies* (IRESS) Marwan Batubara, kondisi sumber daya alam Indonesia mayoritas sudah dikelola oleh pihak asing karena “BUMN cuma menguasai sektor tersebut kira-kira 17

---

dalam  
<http://www.rmolsumsel.com/read/2014/07/03/8988/PDIP:-Doktrin-Maritim-Jokowi-Bikin-Indonesia-Disegani-Dunia-> (diakses 24 Februari 2015).

<sup>38</sup>“Politikus PDIP Akui Jokowi Tak Paham Kemaritiman,” *JPPN*, 17 Desember 2014, dalam <http://www.jpnn.com/read/2014/12/17/276175/Poli>

---

tikus-PDIP-Akui-Jokowi-Tak-Paham-Kemaritiman (diakses 24 Februari 2015).

<sup>39</sup> “Orang PDIP Duga Poros Maritim Ditunggangi Kepentingan Banyak Pihak,” dalam <https://groups.yahoo.com/neo/groups/beritasinggalang/conversations/messages/3400> (diakses 24 Februari 2015).

persen dan sisanya dikuasai pihak asing.<sup>40</sup>

Dampaknya jelas bisa menjalar ke berbagai sektor termasuk sektor perikanan dan kelautan yang menjadi ujung tombak gagasan poros maritim dunia. Menurut Slamet Daroyni, dari organisasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), justeru Undang-Undang yang ada selama ini mengakibatkan kemiskinan masyarakat nelayan semakin bertambah, dan celah penguasaan asing terhadap sumber daya ikan, semakin meningkat. Hal ini bisa dimaknai bahwa "Konsepsi poros maritim dan kebijakan tol laut jangan sampai menjadi jalan bebas hambatan bagi pemodal asing untuk terus menguasai sektor kelautan Indonesia.<sup>41</sup> Faktanya sektor kelautan memang menjanjikan. Dalam sebuah analisis misalnya menemukan bahwa "uang yang beredar

dari sektor jasa angkutan laut sepanjang tahun 2014 diperkirakan lebih dari Rp 54 triliun." Angka ini diperkirakan hanya 10 persen saja yang bersirkulasi di Indonesia, sisanya atau 90 persen lari ke luar negeri.<sup>42</sup>

Untuk lebih memperjelas perdebatan dan sinyalemen ini bisa dilihat dalam peta kepemilikan pihak asing atas berbagai sumber daya alam di Indonesia. Walaupun data berikut belum sepenuhnya bisa diverifikasi, namun setidaknya gambaran ini bisa menjadi bahan kajian dan renungan menarik tentang adanya dugaan penguasaan asing yang mengkhawatirkan. Meskipun data berikut menyatakan sumbernya dari BP Migas, namun penulis mendapatkannya dari sumber yang belum bisa dikatakan sah betul. Berikut disajikan data tersebut.

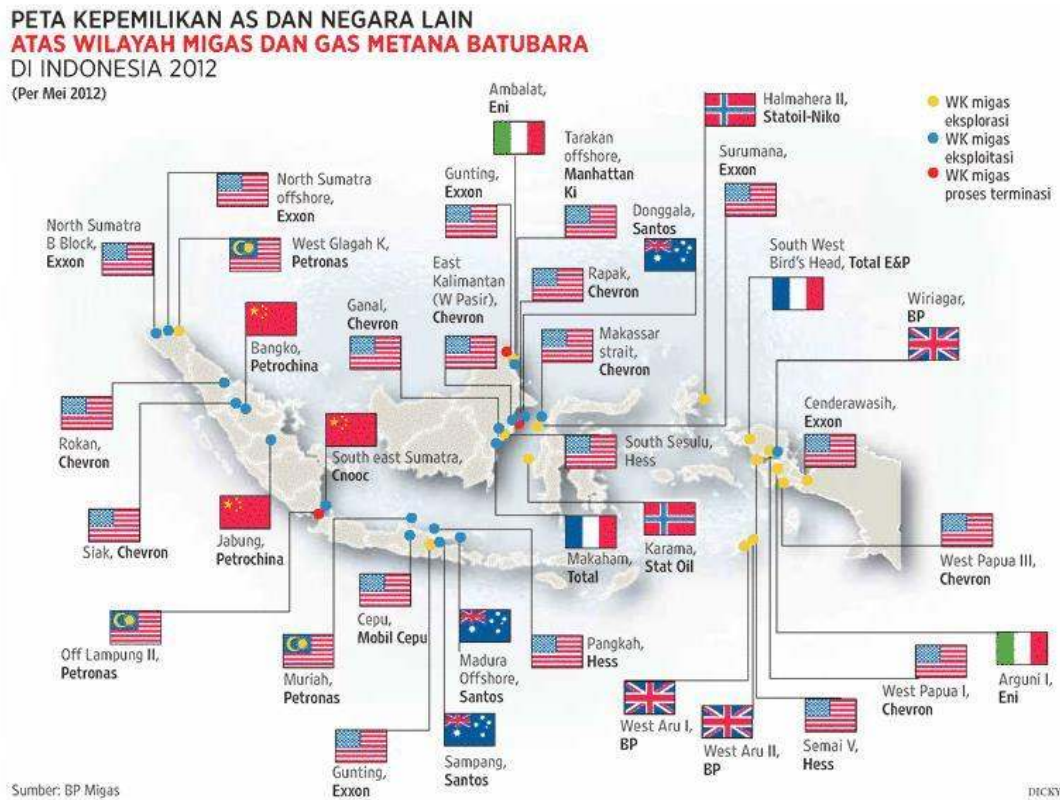
<sup>40</sup> "Penguasaan Migas Oleh Asing Rugikan Negara," *Koran Jakarta*, 9 Mei 2014 dalam <http://www.koran-jakarta.com/?11612-penguasaan%20migas%20oleh%20asing%20rugikan%20negara> (diakses 24 Februari 2015).

<sup>41</sup> "Poros Maritim-Tol Laut Jangan Sampai Jadi Jalan Bebas Pemodal Asing," *Republika*, 23 September 2014 dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/23/nccwvd-poros-maritimtol-laut-jangan-sampai-jadi-jalan-bebas-pemodal-asing> (diakses 24 Februari 2015).

<sup>42</sup> "Asing Kuasai 90 Persen Jasa Sektor Angkutan Laut Rabu," *JPPN*, 17 Desember 2014 dalam <http://www.jpnn.com/read/2014/12/17/276171/Asing-Kuasai-90-Persen-Jasa-Sektor-Angkutan-Laut> (diakses 24 Februari 2015).



### Data Kepemilikan Asing di Indonesia



Sumber : <http://www.energitoday.com/uploads//2013/01/Peta-kepemilikan-AS-dan-negara-lain-atas-wilayah-migas-dan-gas-metana-batubara-di-Indonesia-20123.png>

investasi besar-besaran bersamaan dengan

Data di atas menggambarkan bagaimana mengkuritanya penguasaan asing. Berbagai pihak di dalam negeri tentu sangat sadar tentang situasi ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika presentasi Jokowi dalam pertemuan CEO-APEC di Beijing menuai banyak kritik terutamanya terkait ancaman dominasi asing. Dengan dibukanya kesempatan

peluncuran poros maritim dunia terbuka juga peluang modal asing untuk menguasai sektor kelautan kita. Namun di sisi lain tidak sedikit yang mendukung bahkan mendorong gagasan tersebut segera diimplementasikan. Pada dasarnya sebagian besar pihak setuju bahwa kadahulatan sumber daya mutlak diperlukan. Terpenting menurut Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada

pembangunan yang direncanakan “berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang menjunjung kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>43</sup> Untuk mengetahui sejauh mana gambaran dan potensi bangunan poros maritim dunia Jokowi bisa dilihat dalam skema berikut.

#### Skema Anggaran Pembangunan Poros Maritim Melalui Ide Tol Laut<sup>44</sup>

TAHUN	CONTAINER			
	15.000 DWT		40.000 DWT	
	1.000 TEUs		3.000 TEUs	
	Jumlah Kapal	Miliar Rupiah	Jumlah Kapal	Miliar Rupiah
2015	10	2500	0	0
2016	10	2500	0	0
2017	9	2.250	12	5.400
2018	9	2.500	12	5.400
2019	8	2000	13	5.850
TOTAL	46	11.500	37	16.650

<sup>43</sup> “Merebut Kembali Kedaulatan Migas,”(Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada) dalam <http://ugm.ac.id/id/berita/8269-merebut.kembali.kedaulatan.migas> (diakses 24 Februari 2015).

<sup>44</sup> “Ini Peta Tol Laut Jokowi, Program Andalan Bernilai Puluhan Triliun Rupiah,” *Detik*, 19 November 2014 dalam <http://finance.detik.com/read/2014/11/19/073706/2752292/4/ini-peta-tol-laut-jokowi-program-andalan-bernilai-puluhan-triliun-rupiah> (diakses 24 Februari 2015).

KAPAL BARANG PERINTIS SETARA 208 TEUs		KAPAL PELAYARAN RAKYAT	
Jumlah Kapal	Miliar Rupiah	Jumlah Kapal	Miliar Rupiah
8	1.280	50	2.500
7	1.120	100	5.000
4	640	120	6.000
4	640	130	6.500
3	480	100	5.000
26	5.160	500	25.000

Nilai Investasi pengembangan 24 Pelabuhan : Rp. 39,5T. Sedangkan Nilai Investasi pengadaan kapal : Rp. 53,15T

Dengan demikian, dalam konteks politik dalam negeri, tanggapan atas kebijakan poros maritim Jokowi cukup beragam. Pro dan kontra atas kebijakan ini tidak lepas dari konstelasi politik yang sedang berkembang pasca Pilpres 2014. Pasca Pilpres 2014, pendulum politik masih belum stabil namun tidak sepenuhnya kacau balau. Namun demikian, dalam konteks kebijakan luar negeri, kurang padunya dukungan dalam negeri atas gagasan poros maritim tampaknya kurang mempengaruhi. Karena, kebijakan poros maritim ternyata mendapat perhatian serius dan menjadi isu keamanan kawasan. Oleh karena itu, pada

bagian seterusnya akan didiskusikan tanggapan negara-negara sekitar atas poros maritim ini.

### **Poros Maritim dan Respon Negara-Negara Sekitar**

Ide dan kebijakan poros maritime tampaknya sudah mendapat perhatian banyak pengamat internasional dan tentunya negara-negara sekitar seiring kepopuleran Calon Presiden Jokowi. Sejak munculnya isu pencalonan Jokowi, liputan media asing memang signifikan. Terlepas berbagai spekulasi yang berkembang bahwa liputan media internasional terkait dengan rantai kampanye, pemberitaan tentang fenomena Jokowi tersebut menjadi pintu gerbang dikenalnya konsep gagasan poros maritim dunia. Dalam hal ini jelas bahwa kebijakan poros maritim berdampak signifikan terhadap postur kebijakan luar negeri Indonesia. Isu keamanan kawasan menjadi poin penting meningkatnya diskursus tentang poros maritim oleh berbagai negara khususnya di

Asia Pasifik terutama pasca kemenangan Jokowi atas rivalnya Prabowo Subianto.

Amerika Serikat sebagai salah satu mitra Indonesia misalnya cenderung menyambut baik gagasan poros maritim Jokowi. Melalui Asisten Menteri Luar Negeri bidang Asia Timur dan Pasifik, Scot Marciel menyatakan bahwa pemerintahnya mendukung penuh langkah Jokowi terkait poros maritim dunia. Lebih lanjut menurut mantan Duta Besar untuk Indonesia 2010-2013 tersebut, pemerintahnya mendukung dalam aspek pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan yang akan mengkonektivitaskan perairan dan kemaritiman di Indonesia.<sup>45</sup> Bahkan terkait dengan pembangunan besar-besaran pelabuhan, pemerintah Rusia sudah siap untuk mensukseskan program Jokowi. Menurut salah satu orang terkuat nomor dua di Rusia, Indonesia

<sup>45</sup> "AS Dukung Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia," 2 Desember 2014 dalam <http://m.liputan6.com/news/read/2141692/as-dukung-jokowi-jadikan-indonesia-poros-maritim-dunia> (diakses 24 Februari 2015).

adalah mitra terpenting di kawasan Asia Pasifik.<sup>46</sup>

Meskipun dukungan internasional datang dari dua negara adi daya, ise poros maritim Jokowi mulai menuai kritik dan menimbulkan kekhawatiran di kawasan. Salah satunya beranggapan bahwa gagasan Jokowi dinilai beresiko dan dilihat egois. Apalagi dengan kebijakan penenggelaman kapal, negara-negara tetangga melihatnya sebuah tanda bahaya dan menganggap kebijakan Indonesia semakin agresif dan tegas. Sambil berkata bahwa *“Where some see strength as being the problem, others see weakness,”* kebijakan keras ini diibaratkan sebagai sebuah *balance of power* yang semakin mengkhawatirkan. Berikut kutipan lengkap kritik atas kebijakan Jokowi yang juga membandingkannya dengan politik luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY):

---

<sup>46</sup> “Rusia Siap Bantu Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia,” *Harian Terbit*, 12 November 2014, dalam <http://harianterbit.com/read/2014/11/12/11349/30/21/Rusia-Siap-Bantu-Jokowi-Jadikan-Indonesia-Poros-Maritim-Dunia> (diakses 24 Februari 2015).

*“If Yudhoyono’s foreign policy was criticized for being too elitist and internationally oriented, then the very domestic, realpolitik flavor of Jokowi’s worldview risks being perceived – rightfully or wrongfully – as over correcting this and being too insular or selfish. If countries believe Jokowi’s foreign policy is geared too much toward winning votes at home rather than strengthening friendships abroad, they could also adjust accordingly and in turn complicate Indonesia’s international aspirations.”<sup>47</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan poros maritim yang dimulai dengan tindakan keras atas kapal-kapal pencuri ikan asing, dilihat sebagai sebuah ancaman serius. Setidaknya dari aspek persepsi ancaman dunia internasional mempunyai dua interpretasi terkait

---

<sup>47</sup> “The Trouble With Indonesia’s Foreign Policy Priorities Under Jokowi,” *The Diplomat*, January 9, 2015.

kebijakan maritim yang semakin keras tersebut. Pertama, kebijakan ini mendesak akan pentingnya peningkatan kekuatan armada laut Indonesia. Artinya dalam waktu yang tidak lama, kekuatan Angkatan Laut bisa diprediksi bisa menjadi ancaman serius negara tetangga. Kedua, penguatan maritim juga bisa diartikan bahwa Indonesia memang sedang menghadapi ancaman keamanan serius dari luar.<sup>48</sup> Sehingga tidak mengherankan jika Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai *'big brother'* di kawasan ASEAN.<sup>49</sup>

Sementara Malaysia kelihatan berhati-hati dan mengharapkan "semua pihak di dalam negeri tidak mempermasalahkan penenggelaman kapal nelayan milik Malaysia demi menjaga hubungan baik antar kedua negara."<sup>50</sup> Peringatan ini muncul pasca

penenggelaman kapal nelayan Malaysia dengan nomer pendaftaran PKFA 7738 oleh Polda Sumatera Utara. Oleh karena itu, Panglima Tentara Laut, Laksamana Tan Sri Abdul Aziz Jaafar mengingatkan kepada nelayan-nelayan Malaysia untuk "menjalankan aktivitas penangkapan ikan di perairan Malaysia untuk menghindari aksi penenggelaman kapal oleh pihak keamanan Indonesia."<sup>51</sup> Sebaliknya, menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno tindakan ini sangat penting "sebagai pelajaran dan peringatan kepada semua penangkap ikan agar tidak mengulangi perbuatan salah tersebut."<sup>52</sup>

Sayangnya, akibat kebijakan poros maritim dengan aksi-aksi penenggelaman kapal, negara-negara sekitar juga semakin meneliti sejauhmana tingkat dan kemampuan pertahanan Indonesia sesungguhnya. Secara umum, menurut *Global Fire Power* armada laut Indonesia

<sup>48</sup> Shekhar and Liow, *ibid*.

<sup>49</sup> "Indonesia Keen On 'Big Brother' Role in ASEAN and Beyond: Official," *The Diplomat*, December 23, 2014.

<sup>50</sup> "Jangan Mempolemikkan Kejadian Kapal Nelayan Ditenggelamkan – Hishammuddin," *M-Star*, 10 Januari 2015.

<sup>51</sup> "Jalankan aktiviti nelayan di perairan Malaysia sahaja," *Utusan Malaysia*, 5 Februari 2015.

<sup>52</sup> "Indonesia bom kapal nelayan Malaysia," *Sinar Harian*, 9 Januari 2015.

memiliki total kekuatan sebesar 171 kapal termasuk *Frigates* (6 buah), *Corvettes* (26 buah), Kapal Selam (2 buah), Kapal Pertahanan Pantai *Coastal Defense Craft* (21 buah), dan *Mine Warfare* (12 buah). Jumlah ini jelas sangat tidak mencukupi untuk menjaga luas wilayah Indonesia dengan panjang garis pantai mencapai 54.716km. Singapura yang hanya memiliki garis pantai 193km saja armadanya berkekuatan 40 kapal yang terdiri dari *Frigates* (6 buah), *Corvettes* (6 buah), Kapal Selam (6 buah), *Coastal Defense Craft* (12 buah) dan *Mine Warfare* (4 buah).<sup>53</sup> Dari sisi anggaran pertahanan juga belum memenuhi *minimum essential force* yang hanya sekitar US\$8.3 miliar (0,9 % GDP). Alokasi ini jauh jika dibandingkan dengan berbagai negara yang rata-rata sudah di atas 2 % dari GDP (sudah mencapai *minimum essential force*) misalnya Australia (US\$26 miliar), China (US\$112 miliar), India (US\$36 miliar),

Jepang (US\$51 miliar) dan Korea Selatan (US\$ 31,8 miliar).<sup>54</sup> Menurut Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, poros maritim “belum dapat terwujud secara sempurna jika Indonesia belum memiliki kekuatan TNI AL yang handal dan disegani di kawasan.”<sup>55</sup>

Dengan demikian dalam konteks ini, terlihat bahwa tanggapan negara-negara sekitar terkait poros maritim cukup beragam. Sebagian melihatnya sebagai agresifitas, namun seperti Malaysia kelihatan berhati-hati karena seringkali terlibat ketegangan masalah perbatasan yang sangat sensitif. Namun poros maritim juga menunjukkan kelemahan sesungguhnya kemampuan pertahanan Indonesia di mata negara sekitar. Tetapi, bukan tidak mungkin dalam beberapa periode mendatang, kemampuan pertahanan Indonesia bisa meningkat signifikan. Jika hal ini benar-benar terjadi, bukan tidak mungkin

<sup>53</sup> Global Fire Power dalam <http://www.globalfirepower.com/navy-ships.asp> (26/2/2015).

<sup>54</sup> Shekhar and Liow, *ibid*.

<sup>55</sup> “Visi Maritim Jokowi, Harus Didukung TNI AL yang Kuat,” 11 Oktober 2014 dalam <http://www.nefosnews.com/post/nasional/visi-maritim-jokowi-harus-didukung-tni-al-yang-kuat> (diakses 24 Februari 2015).

apa yang dibayangkan oleh negara sekitar tentang agresifitas politik luar negeri Indonesia menjadi kenyataan. Paling tidak, hal ini bisa menjadi efek getar (*deterrence effect*) bagi negara-negara yang selama ini memandang kelemahan militer Indonesia.

### Kesimpulan

Sebagai penutup, artikel ini menyimpulkan bahwa dari aspek postur kebijakan luar negeri, konsep “bebas-aktif” masih dipertahankan pemerintahan Jokowi dengan beberapa penyesuaian. Terkait kebijakan poros maritim dunia, berbagai pihak dalam negeri menaggapinya secara beragam. Pro dan kontra atas kebijakan tersebut tidak lain akibat polarisasi politik pasca Pilpres 2014. Konstelasi tersebut mengakibatkan kurang padunya dukungan dalam negeri atas gagasan poros maritim namun dampaknya tidak signifikan dengan impementasi kebijakan tersebut. Sebaliknya, ide poros maritim dunia mendapat perhatian serius dan menjadi isu keamanan kawasan. Sebagian negara-

negara sekitar melihatnya sebagai agresifitas, sebagian berhati-hati misalnya Malaysia. Kebijakan poros maritim dunia juga memunculkan evaluasi sekaligus kewaspadaan kawasan terhadap kemampuan pertahanan Indonesia sebagai negara paling penting di Asia Tenggara. Jika peluang ini benar-benar direspon dan dimanfaatkan pemerintah, otomatis bisa meningkatkan daya tawar diplomasi Indonesia tidak hanya di kawasan tetapi di tingkat global.

### Daftar Pustaka

#### Buku dan Jurnal

- Anwar, Dewi Fortuna. "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 3 (2010): 37-54.
- Anwar, Dewi Fortuna. "Key Aspects of Indonesia's Foreign Policy." Dalam *Indonesia: Foreign Policy and Domestic Politics*, eds. Dewi Fortuna Anwar and Harold Crouch (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).
- Anwar, Dewi Fortuna and Harold Crouch. *Indonesia: Foreign Policy and Domestic Politics*. Trends in Southeast Asia Series, no. 9 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).
- Glaser, Charles L. "Structural Realism in a more complex world." *Review of*

- International Studies*, 29 (2003): 403-414.
- Ganesan, N. and Ramses Amer. eds. *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010).
- Lili Yulyadi Arnakim. "Hubungan Dinamik Antara Indonesia dan Malaysia Pasca Merdeka: Peranan Faktor "Co-Religio" Dalam Hubungan Dua Hala." Dalam *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia*. eds. Mohamad Redzuan Othman, Md Sidin Ahmad Ishak, Jas Laile S. Jaafar, Adrianus Meliala and Sri Murni (Shah Alam: Arah Publications, 2009), 359-371.
- Mohd Noor Yazid. "Indonesia-Malaysia Political Relations: the Idiosyncratic Factor in Foreign Policy Decision Making." *Asian Profile* 34, no.5 (October 2006): 455-476.
- Ratna Shofi Inayati. "Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 2, no.1 (2005): 35-49.
- Shekhar, Vibhanshu and Joseph Chinyong Liow. "Indonesia as a Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies, and Obstacles Ahead." (Washington, D.C: The Brookings Institution, November 2014).
- Simon, Sheldon W. "Indonesia's Foreign Policy by Michael Leifer Review." *Pacific Affairs*, Vol. 57, No. 1 (Spring, 1984): 171-172.
- Sterling-Folker, Jennifer. "Competing Paradigms or Birds of a Feather? Constructivism and Neoliberal Institutionalism Compared." *International Studies Quarterly* 44, no.1 (March 2000): 97-119.
- Sterling-Folker, Jennifer. "Realist Environment, Liberal Process, and Domestic Politics." *International Studies Quarterly* 14, no.1 (March 1997): 1-25.
- Suryadinata, Leo. *Indonesia's Foreign Policy under Suharto: Aspiring to International Leadership*. (Singapore: Times Academic Press, 1997).
- Sukma, Rizal. "War on terror: Islam and the imperative of democracy." *Asia Europe Journal*, 2 (2004): 85-93.
- Sukma, Rizal. "The Future of ASEAN: Towards A Security Community." Paper presented at A Seminar on "ASEAN Cooperation: Challenges and Prospects in the Current International Situation," New York, 3 June 2003.
- Sukma, Rizal. *Islam and Foreign Policy in Indonesia: Internal Weakness and the Dilemma of Dual Identity*. The Asia Foundation Working Paper, no. 11, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999).
- Taliaferro, Jeffrey W. "State Building for Future Wars: Neoclassical Realism and the Resource-Extractive State." *Security Studies* 15, no. 3 (July-September 2006): 464-495, 477.
- Valerie M. Hudson. "Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations," *Foreign Policy Analysis*, 1(2005): 1-30.
- Waltz, Kenneth N. "Structural Realism after the Cold War." *International Security* 25, no. 1 (Summer 2000): 5-41.
- Dokumentasi Resmi**
- Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014*



(Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014).

### Surat Kabar

“The Trouble With Indonesia’s Foreign Policy Priorities Under Jokowi,” *The Diplomat*, January 9, 2015.

“Indonesia Keen On ‘Big Brother’ Role in ASEAN and Beyond: Official,” *The Diplomat*, December 23, 2014.

“Jangan Mempolemikkan Kejadian Kapal Nelayan Ditenggelamkan – Hishammuddin,” *M-Star*, 10 Januari 2015.

“Jalankan aktiviti nelayan di perairan Malaysia sahaja,” *Utusan Malaysia*, 5 Februari 2015.

### Internet

*Badan Informasi Geospasial*,

“Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri,” dalam <http://www.bakosurtanal.go.id/beritasurta/show/mewujudkanindonesiasebagaiporosmaritiminduniayangmajudanmandiri> (diakses 29 Januari 2015).

“Politik Luar Negeri Bebas Aktif Masih Jadi Pijakan Pemerintahan Presiden Jokowi,” *VOA Indonesia*, 21 Oktober 2014, dalam <http://www.voaindonesia.com/content/politik-luar-negeri-bebas-aktif-masih-jadi-pijakan-pemerintahan-presiden-jokowi/2490867.html> (diakses 30 Januari 2015).

“Pidato Jokowi: Indonesia poros maritim dunia,” dalam <http://www.rappler.com/world/regions/asiapacific/indonesia/74928-pidato-jokowi-indonesia-poros-maritim-dunia> (diakses 29 Januari 2015).

“Asosiasi perikanan kritik kebijakan Menteri Susi,” *Antara*, 21 Januari 2015, dalam <http://www.antaranews.com/berita/475351/asosiasi-perikanan-kritik-kebijakan-menteri-susi> (diakses 23 Februari 2015).

“DPR Kritik Pemerintah Jokowi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal,” *Republika*, 25 November 2014, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/25/nfl5wm-dpr-kritik-perintah-jokowi-tenggelamkan-kapal-asing-ilegal> (diakses 24 Februari 2015).

“Ketua Komisi I DPR Kritik Jokowi di APEC,” dalam <http://m.inilah.com/news/detail/2153484/ketua-komisi-i-dpr-kritik-jokowi-di-apec> (diakses 24 Februari 2015).

“Pakar Maritim Anggap Jokowi 'Bulshit', Tak Paham Sok Bicara Poros Maritim,” *SuaraNews*, dalam <http://www.suaranews.com/2014/06/pakar-maritim-anggap-jokowi-tak-paham.html> (diakses 24/2/2015).

“Mulai Curiga Jokowi Hanya Membual soal Poros Maritim,” *JPPN*, 5 Februari 2015, dalam <http://m.jpnn.com/news.php?id=285741> (diakses 24 Februari 2015).

“Jokowi Memang Harus Jadi ‘Pedagang’ di KTT APEC,” *kompasiana.com*, dalam <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/11/13/jokowi-memang-harus-jadi-pedagang-di-ktt-apec-686396.html> (diakses 24 Februari 2015).

“PDIP: Doktrin Maritim Jokowi Bikin Indonesia Disegani Dunia,” *Rakyat Merdeka*, 3 Juli 2014, dalam <http://www.rmolsumsel.com/read/2014/07/03/8988/PDIP:-Doktrin-Maritim-Jokowi-Bikin-Indonesia-Disegani-Dunia-> (diakses 24 Februari 2015).

“Politikus PDIP Akui Jokowi Tak Paham Kemaritiman,” *JPPN*, 17 Desember 2014, dalam <http://www.jpnn.com/read/2014/12/17/276175/Politikus-PDIP-Akui-Jokowi-Tak-Paham-Kemaritiman> (diakses 24 Februari 2015).

- “Orang PDIP Duga Poros Maritim Ditunggangi Kepentingan Banyak Pihak,” dalam <https://groups.yahoo.com/neo/groups/beritasinggalang/conversations/messages/3400> (diakses 24 Februari 2015).
- “Penguasaan Migas Oleh Asing Rugikan Negara,” *Koran Jakarta*, 9 Mei 2014 dalam <http://www.koran-jakarta.com/?11612-penguasaan%20migas%20oleh%20asing%20rugikan%20negara> (diakses 24 Februari 2015).
- “Poros Maritim-Tol Laut Jangan Sampai Jadi Jalan Bebas Pemodal Asing,” *Republika*, 23 September 2014 dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/23/nccwvd-poros-maritimtol-laut-jangan-sampai-jadi-jalan-bebas-pemodal-asing> (diakses 24 Februari 2015).
- “Asing Kuasai 90 Persen Jasa Sektor Angkutan Laut Rabu,” *JPPN*, 17 Desember 2014 dalam <http://www.jpnn.com/read/2014/12/17/276171/Asing-Kuasai-90-Persen-Jasa-Sektor-Angkutan-Laut> (diakses 24 Februari 2015).
- “Merebut Kembali Kedaulatan Migas,” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada) dalam <http://ugm.ac.id/id/berita/8269-merebut.kembali.kedaulatan.migas> (diakses 24 Februari 2015).
- “Ini Peta Tol Laut Jokowi, Program Andalan Bernilai Puluhan Triliun Rupiah,” *Detik*, 19 November 2014 dalam <http://finance.detik.com/read/2014/11/19/073706/2752292/4/ini-peta-tol-laut-jokowi-program-andalan-bernilai-puluhan-triliun-rupiah> (diakses 24 Februari 2015).
- “AS Dukung Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia,” 2 Desember 2014 dalam <http://m.liputan6.com/news/read/2141692/as-dukung-jokowi-jadikan-indonesia-poros-maritim-dunia> (diakses 24 Februari 2015).
- “Rusia Siap Bantu Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia,” *Harian Terbit*, 12 November 2014, dalam <http://harianterbit.com/read/2014/11/12/11349/30/21/Rusia-Siap-Bantu-Jokowi-Jadikan-Indonesia-Poros-Maritim-Dunia> (diakses 24 Februari 2015).
- “Indonesia bom kapal nelayan Malaysia,” *Sinar Harian*, 9 Januari 2015. Global Fire Power dalam <http://www.globalfirepower.com/navy-ships.asp> (26/2/2015).
- “Visi Maritim Jokowi, Harus Didukung TNI AL yang Kuat,” 11 Oktober 2014 dalam <http://www.nefosnews.com/post/nasional/visi-maritim-jokowi-harus-didukung-tni-al-yang-kuat> (diakses 24 Februari 2015).
- <http://www.energitoday.com/uploads//2013/01/Peta-kepemilikan-AS-dan-negara-lain-atas-wilayah-migas-dan-gas-metana-batubara-di-Indonesia-20123.png> (diakses 24 Februari 2015).